



# RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN  
**2025**



**DINAS TENAGA KERJA**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Pemda Kota Dumai yang memuat Visi, Misi dan Strategi kebijakan yang didasarkan kepada situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan dan permasalahan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dirasakan masih ada kekurangan-kekurangannya, untuk itu kami mengaharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi pelaksanaan tugas kedepan agar lebih baik lagi.

Dumai, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA DUMAI



**SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770524 199602 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 LANDASAN HUKUM .....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA .....	6
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN .....	18
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI .....	24
2.4 REVIEW RANCANGAN AWAL .....	26
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	41
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	43
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA .....	44
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	44
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>77</b>
4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	77
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>83</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Program berdasarkan RKPD tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yaitu :

#### **Urusan Wajib**

- 1 Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3 Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 4 Program Hubungan Industrial;
- 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transformasi serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan komprehensif Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, sebagai dasar dan acuan ketentuan yuridis dan menyusun Rencana Kinerja TA. 2025 adalah:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kota Dumai.

#### **1.3.2 Tujuan**

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja
- Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
- Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
- Program dan Kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

## BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2023, capaian Rencana Kerja tahun 2024 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sesuai tabel T-C 29 :

**Tabel T-C 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS TENAGA KERJA**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA S/D TAHUN 2024**  
**KOTA DUMAI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>0</b>	<b>Non Urusan</b>									
<b>01:02:01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,72%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>67,80%</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54,95%	2 Dokumen	2 Dokumen	-

1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	91,44%	3 Laporan	3 Laporan	-
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>93,10%</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,10%	27 Orang/Bulan	12 Bulan	-
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	93,18%	1 Laporan	1 Laporan	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

1.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0 Dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>98,86%</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>	-
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	99,59%	2 Paket	2 Paket	-
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 bulan	2 Paket	2 Paket	99,84%	3 Paket	3 Paket	-
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	3 Paket	3 Paket	99,83%	2 Paket	2 Paket	-
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	51,93%	2 Paket	2 Paket	-
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Bulan	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-

1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	99,91%	12 Laporan	12 Laporan	-
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16 Unit</b>	<b>- 1 Unit Motor - 2 Paket - 3 Unit Mobil - 2 Unit Motor</b>	<b>-1 Unit Mobil - 3 Unit Mobil - 2 Unit Motor - 1 Paket - 50 Unit -1 Unit</b>	<b>-1 Unit Mobil - 3 Unit Mobil - 2 Unit Motor - 1 Paket - 50 Unit -1 Unit</b>	<b>97,23%</b>	<b>-1 Unit Mobil - 6 Unit Motor - 1 Paket - 50 Unit -1 Unit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit Mobil	-	1 Unit Mobil	-	99,96%	-	-	-
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Mobil Pick Up	1 Unit Motor	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	-
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Paket	5 Unit	5 Unit	91,56%	11 Unit	11 Unit	-
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>-</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>98,87%</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	-
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	95,66%	12 Laporan	12 Laporan	-
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	99,47%	12 Laporan	12 Laporan	-
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74 Unit</b>	<b>- 12 Bulan - 6 Unit Mobil - 65 Unit Peralatan dan Mesin - 3 paket gedung kantor, 4 rumah terampil</b>	<b>- 12 Bulan - 10 Unit Mobil - 75 Unit Peralatan dan Mesin - 1 Unit</b>	<b>- 12 Bulan - 10 Unit Mobil - 75 Unit Peralatan dan Mesin - 1 Unit</b>	<b>99,84%</b>	<b>- 12 Bulan - 10 unit - 65 Unit 1 Unit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	6 Unit Mobil	10 Unit	10 Unit	99,99%	- 10 Unit	-	-
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit	75 Unit	75 Unit	98,80%	65 Unit	-	-
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	- 1 unit gedung kantor - 1 rumah terampil	1 Unit	1 Unit	99,98%	1 Unit	-	-

2.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD</b>	100		100	100	95,26%	100	-	-
2.07.02.2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dg Rencana Tenaga Kerja</b>	75		75	75	95,26%	75	-	-
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	95,26%	-	-	-
2.07.02.2.01.0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40 Orang	-	-	-	-	20 Orang	-	-
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan</b>	10	10	10	10	96,02%	10	10	-
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi</b>	644 Orang	70 Orang	64 Orang	64 Orang	95,95%	10 Orang	-	-
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	70 Orang	64 Orang	64 Orang	95,95%	10 Orang	-	-
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	-	-	-	-	4 Unit	-	-
2.07.03.2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS</b>	30 LPK	100%	100%	-	100,00%	100%	-	-

2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	1 Paket	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	41 Lembaga	-	-
<b>2.07.03.2.03</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Persentase Peningkatan pemahaman ttg perizinan pd LPKS</b>	<b>0 Perizinan</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	-	-
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	-	-	-	-	10 Perizinan	-	-
<b>2.07.03.2.04</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil</b>	<b>50 Perusahaan</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>96,12%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	-	20 Perusahaan	-	96,12%	20 Perusahaan	20 Perusahaan	-
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	<b>25%</b>	-	-
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>98,49%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	-
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>99,21%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	-
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	-	-	-	-	15 Orang	-	-

2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	-	-	-	-	20 Orang	-	-
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	-	450 Orang	-	100,00%	50 Orang	-	-
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	-	-	-	-	30 Orang	-	-
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	105 Orang	50 Orang	50 Orang	98,88%	50 Orang	-	-
<b>2.07.04.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengawasan dan Pengendalian LKPTS</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	-	-	-	-	10 Lembaga	-	-
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>98,03%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>-</b>
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	1 Paket	2 Dokumen	2 Dokumen	98,30%	2 Dokumen	-	-
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	-	-	-	-	200 Orang	-	-
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-

2.07.04.2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pelindungan Pekerja Migran</b>	85	-	85		97,53%	85	85	-
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	-	20 Orang	-	97,53%	35 Orang	-	-
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	70 Orang	-	-	-	-	20 Orang	-	-
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun</b>	95	80	85	-	97,22%	90	90	-
		<b>Menurunnya Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun</b>	35	25	30	-	-	35	35	-
2.07.05.2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial</b>	85	85	85	85	99,69%	85	85	-
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	-	50 Perusahaan	-	99,15%	15 Perusahaan	-	-
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	-	25 Perusahaan	-	100,00%	5 Perusahaan	-	-

2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	99,79%	1 Laporan	-	-
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>95,95%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	-	55 Perkara	55 Perkara	76,69%	15 Perkara		
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50 Perkara	-	50 Perkara	-	99,94%	40 Perkara		
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	1 Dokumen	-	91,09%	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja		
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	-	-	-	-	1 Lembaga	-	

2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.000 Orang	-	5.000 Orang	-	97,46%	16.000 Orang		
-------------------	--	---	--------------	---	-------------	---	--------	--------------	--	--

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

### A. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator kinerja untuk program ini yaitu Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dimana Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan

Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas:

1. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima;
2. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan;
3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia;
4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja;
5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.

#### A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	SASARAN		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	10,6 %	70,7 %	15 %	4,36 %	29,6 %	<b>Tidak Berhasil</b>
		Persentase penempatan tenaga kerja	12,64 %	126,4 %	10 %	41,75 %	141,8 %	<b>Sangat Berhasil</b>
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan	176,47 %	305,88 %	30 %	80,95 %	269,83 %	<b>Sangat Berhasil</b>

		perusahaan						
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<b>Sangat Berhasil</b>
<i>Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023</i>								

1. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

Capaian kinerja untuk indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 15% realisasi sebesar 4,36%, tercapai 29,6% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 10,6% atau tercapai sebesar 70,7%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 41,1%.

2. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase Penempatan Tenaga Kerja.

Capaian kinerja untuk indikator persentase penempatan tenaga kerja menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 10% realisasi sebesar 41,75%, tercapai 141,8% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 12,64% atau tercapai sebesar 126,4%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 15,4%.

3. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan.

Capaian kinerja untuk indikator persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 30% realisasi sebesar 80,95%, tercapai 269,83% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 176,47% atau tercapai sebesar 305,88%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 36,05%.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2023) dengan tahun lalu (2022):

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Persentase	15%	15%	10,6%	4,36%	70,7%	29,6%
		penempatan tenaga kerja	10%	10%	12,64%	41,75%	126,4%	141,8%
2.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	25%	30%	76,47%	80,95%	305,88 %	69,83%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Indikator Kinerja Sasaran: Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.

Indikator pertama adalah Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dengan target pada Tahun 2022 adalah 15% berasal dari perhitungan jumlah peserta pelatihan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Pada Tahun 2022 jumlah peserta pelatihan sebanyak 278 orang terdiri dari pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 70 orang, pelatihan MTU (Mobile Training Unit) sebanyak 12 paket dengan peserta 16 orang per paket pelatihan jumlah seluruh peserta pelatihan sebanyak 192 orang, dan pelatihan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) sebanyak 16 orang dari 2.627 Orang yang terdaftar Realisasi pada Tahun 2022 adalah 10,6% dengan capaian 70,7%. Pada Tahun 2023 jumlah peserta pelatihan sebanyak 80 orang terdiri dari pelatihan dengan anggaran APBD sebanyak 64 orang dan pelatihan dengan anggaran mitra Disnaker sebanyak 16 orang dari 1.832

Orang yang terdaftar Realisasi pada Tahun 2023 adalah 4,36% dengan capaian 29,6%.

Pada tahun 2023 target kinerja tetap untuk indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan capaian kinerja hanya tercapai untuk tahun 2023 sebesar 4,36% permasalahannya, yaitu kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan sehingga peserta yang dilatih disesuaikan dengan anggaran yang ada.

2. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase penempatan tenaga kerja.

Pada Tahun 2022 Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 332 Orang dari 2.627 Orang yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja dengan target pada tahun 2022 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada tahun 2022 adalah 12,64% dengan capaian 126,4%. Pada Tahun 2023 Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 765 Orang dari 1.832 Orang yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja dengan target pada Tahun 2023 adalah 10 % berasal dari perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 41,75% dengan capaian 141,8%.

3. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan.

Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Pada Tahun 2022 kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 17 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 13 kasus atau 76,47 %. Sementara untuk tahun 2023 hingga bulan Desember tahun 2023 kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 42 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 34 kasus atau 80,95 %.

Pada tahun 2023 target kinerja tetap kecuali untuk Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan naik menjadi 30% dari sebelumnya yaitu 25%.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai:

1. Indikator Kinerja Sasaran: Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 15% dari target yang ditetapkan.

2. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase penempatan tenaga kerja.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 10% dari target yang ditetapkan

3. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 30 % dari target yang ditetapkan.

Tabel T-C. 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja  
Kota Dumai**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tenaga Kerja											
1.1.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan	-	-	10	10	10	10	43,60	-	-	-	
1.2.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	-	-	10	10	10	10	417,50	-	-	-	
1.3.	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	-	-	20	20	20	20	80,95	-	-	-	

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai**

Berdasarkan telaahan permasalahan setiap pelaksanaan urusan daerah maupun telaahan terhadap Kajian lingkungan hidup strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai dan dokumen rencana pembangunan nasional serta provinsi, serta hasil diskusi dengan kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan hilir sebagai kabupaten tetangga maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi;
- Optimalisasi sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
- Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
- Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu;
- Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan rumusan permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah disepakati, maka isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD dengan mengacu pada isi-isu Strategis Pembangunan Kota Dumai selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### **1. Tingginya Angka Pengangguran**

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian, pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu

penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja, dimana peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Rumah Terampil - Latihan Kerja yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan. Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja.

## 2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja

Isu rendahnya kualitas tenaga kerja ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh mereka yang mempunyai pendidikan maksimal tamat SD, kemudian tamatan SLTP dan tamatan SLTA. Pendidikan tinggi merupakan bagian terkecil dari seluruh angkatan kerja. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yaitu dengan menjembatani dunia pendidikan formal dengan dunia kerja. Pasar kerja mensyaratkan kompetensi dan kualifikasi diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensinya melalui berbagai keterampilan di balai/lembaga pelatihan kerja dan dengan demikian diperlukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas calon tenaga kerja pada lembaga pelatihan.

## 3. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Maraknya unjuk rasa pekerja diantaranya disebabkan masih lemahnya lembaga hubungan industrial. Tuntutan pekerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi Isu Strategis untuk penanganan

ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui perbaikan penghasilan (pemenuhan Upah yang layak dan berkeadilan diterima semua pihak) dan sarana hubungan industrial. Kurangnya perlindungan terhadap pekerja dapat dijelaskan bahwa masih adanya perilaku yang diskriminasi, adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan antara yang diberikan pada tenaga kerja laki-laki dan perempuan, masih banyak anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal**

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana yang telah dicantumkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2025 merupakan rangkaian tahapan pencapaian Visi Wali Kota Dumai yang dilaksanakan melalui misi, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

- Adapun Program dan kegiatan memenuhi target kinerja sesuai Renstra;
- Melebihi target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- Adapun Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dalam Restra adalah memenuhuni dan sesuai target.

**Tabel T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2025 Kota Dumai**

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tenaga Kerja					Tenaga Kerja					
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Dumai	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	100	150.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Dumai	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	100	150.000.000	
1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Dumai	Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dg Rencana Tenaga Kerja	75	150.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Dumai	Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dg Rencana Tenaga Kerja	75	150.000.000	
1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Dumai	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40 Orang	150.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Dumai	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40 Orang	150.000.000	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Dumai	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10	1.925.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Dumai	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10	1.925.000.000	

<b>2.1</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>644 Orang</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>644 Orang</b>	<b>1.800.000.000</b>	
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	1.000.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	1.000.000.000	
2.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	800.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	800.000.000	
<b>2.2</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS</b>	<b>30 LPK</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS</b>	<b>30 LPK</b>	<b>0</b>	
2.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Dumai	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Dumai	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	0	
<b>2.3</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Peningkatan pemahaman ttg perizinan pd LPKS</b>	<b>0 Perizinan</b>	<b>0</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Peningkatan pemahaman ttg perizinan pd LPKS</b>	<b>0 Perizinan</b>	<b>0</b>	
2.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	0	

2.4	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil</b>	<b>50 Perusahaan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil</b>	<b>50 Perusahaan</b>	<b>50.000.000</b>	
2.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Dumai	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Dumai	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	50.000.000	
2.5	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>25%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>25%</b>	<b>75.000.000</b>	
2.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0 Dokumen	75.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0 Dokumen	75.000.000	
3.	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja</b>	<b>40</b>	<b>835.000.000</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja</b>	<b>40</b>	<b>835.000.000</b>	
3.1	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan</b>	<b>40</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan</b>	<b>40</b>	<b>450.000.000</b>	
3.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Dumai	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Dumai	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0	

3.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	0	Pelayanan antar Kerja	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	0	
3.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Dumai	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	50.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Dumai	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	50.000.000	
3.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	150.000.000	
3.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	250.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	250.000.000	
3.2	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	<b>Persentase Pengawasan dan Pengendalian LKPTS</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	<b>Persentase Pengawasan dan Pengendalian LKPTS</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
3.2.1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Dumai	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Dumai	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	0	
3.3	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Kota Dumai	<b>Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>85</b>	<b>315.000.000</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Kota Dumai	<b>Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>85</b>	<b>315.000.000</b>	

3.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Dumai	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	65.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Dumai	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	65.000.000	
3.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Dumai	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Dumai	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	0	
3.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Dumai	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	250.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Dumai	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	250.000.000	
3.4	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	<b>Persentase Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran</b>	<b>85</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	<b>Persentase Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran</b>	<b>85</b>	<b>70.000.000</b>	
3.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Dumai	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	50.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Dumai	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	50.000.000	
3.4.2	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Dumai	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	70 Orang	20.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Dumai	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	70 Orang	20.000.000	
4.	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Kota Dumai	<b>Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun</b>	<b>95</b>	<b>4.009.200.000</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Kota Dumai	<b>Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun</b>	<b>95</b>	<b>4.009.200.000</b>	

		Kota Dumai	Menurunnya Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	35			Kota Dumai	Menurunnya Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	35		
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial	85	430.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial	85	430.000.000	
4.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Dumai	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	15.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Dumai	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	15.000.000	
4.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kota Dumai	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	15.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kota Dumai	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	15.000.000	
4.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Dumai	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Dumai	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	400.000.000	

4.2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial</b>	<b>100</b>	<b>3.579.200.000</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial</b>	<b>100</b>	<b>3.579.200.000</b>	
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20.000.000	
4.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50 Perkara	50.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50 Perkara	50.000.000	
4.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kota Dumai	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kota Dumai	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000	

4.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	250.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	250.000.000	
4.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Dumai	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.000 Orang	3.250.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Dumai	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.000 Orang	3.250.000.000	
5.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Dumai	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>6.261.559.280</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Dumai	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>6.261.559.280</b>	
5.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	65.000.000	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	

5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	
5.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	
<b>5.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>3.399.590.180</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>3.399.590.180</b>	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.389.590.180	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.389.590.180	
5.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.000.000	

5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	
5.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>10.000.000</b>	
5.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	
5.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>	
5.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	

5.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 Dokumen	495.050.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 Dokumen	495.050.000
5.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
5.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000
5.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000
5.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000
5.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.050.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.050.000
5.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000

5.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	
5.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16 Unit</b>	<b>935.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16 Unit</b>	<b>935.000.000</b>	
5.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit Mobil	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit Mobil	0	
5.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Mobil Pick Up	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Mobil Pick Up	450.000.000	
5.6.3	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	70.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	70.000.000	
5.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	415.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	415.000.000	

5.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
<b>5.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>1.013.619.100</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>1.013.619.100</b>
5.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000
5.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	122.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	122.000.000
5.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0
5.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	886.619.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	886.619.100
<b>5.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74 Unit</b>	<b>343.300.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74 Unit</b>	<b>343.300.000</b>

5.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	208.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	208.300.000	
5.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	40.000.000	
5.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	95.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	95.000.000	
<b>TOTAL</b>					<b>13.180.759.280</b>	<b>TOTAL</b>					<b>13.180.759.280</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Musrenbang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan lebih baik dan tepat sasaran dari waktu ke waktu. Untuk itu, masukan dan pendapat serta kritik sangat diperlukan. Namun yang paling penting, bagaimana agar pembangunan dilaksanakan sesuai visi Dumai, mewujudkan masyarakat makmur dan madani.

“RKPD merupakan penjabaran RPJMD, sebagai dasar pembangunan 2025. Namun yang sangat penting adalah pelayanan wajib dasar paling utama,”

Musrenbang dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota, Musrenbang akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD Kota Dumai 2025, yang berisikan program dan kegiatan yang nantinya akan menjadidasar penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian diharapkan melalui Musrenbang RKPD ini dapat meningkatkan kesatuan antara program dan kegiatan tahunan yang lebih terpadu, komprehensif, transparan dan

Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Dumai sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah, yang dimulai dari Musrenbang

Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Dumai.

Ada pun maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2025 untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan pemerintah pusat dan Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD yang telah dilaksanakan.

Musrenbang juga dilaksanakan untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah serta menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah, untuk menyelaraskan usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan sebagaimana sesuai TUPOKSI Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dimana musrenbang TA. 2025 belum dilaksanakan.

**Tabel T-C 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kota Dumai**

**Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

#### **3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja rating audit BPK;
6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan;
7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada dasarnya selaras dengan sasaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Terdapat sedikit perbedaan sasaran pada Kementerian Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja**

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai.

Sesuai Misi 1 (pertama) yakni *"Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri"*, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran selama 5 tahun kedepan. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai adalah Memaksimalkan tenaga kerja bagi masyarakat Dumai dengan cara :

1. Melaksanakan Pelatihan Kerja (Workshop) yang berpusat di Kecamatan dan Kelurahan;
2. Memprioritaskan Lowongan Kerja bagi penduduk Kota Dumai;
3. Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap tenaga kerja di BUMD.

Ada pun Program dan Kegiatan yang direncanakan tersebut adalah terjemahan dari program prioritas Kepala Daerah Tahun 2025 untuk Bidang Tenaga Kerja yaitu:

1. Menambah jenis Pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai;
2. Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai;
3. Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap tenaga kerja.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya Tingkat Pengangguran, yang diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu : Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan target kinerja adalah rasio tenaga kerja terampil dan produktif; Meningkatnya kesempatan kerja dengan target kinerja adalah persentasi penempatan terhadap pencari kerja terdaftar; Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan target kinerja rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial; serta Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan target kinerja adalah jumlah

penempatan transmigran. Target kinerja ini merupakan dasar pertimbangan disusunnya Rencana Program dan Kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam Misi 1 (pertama) Wali Kota Dumai yakni “*Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri*”.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan menumbuhkan wirausaha baru;
3. Meningkatkan kesempatan dan perluasan kerja;
4. Mewujudkan hubungan industri yang harmonis, berkeadilan dan pelayanan penyelesaian kasus Hubungan Industrial/PHK dalam upaya perlindungan tenaga kerja;
5. Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
6. Mewujudkan kualitas kerja yang efisien dan efektif dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;
7. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Transmigrasi yang masih belum terselesaikan.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Penetapan program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di bawah ini:

Program yang mendukung adalah :

- **Program Perencanaan Tenaga Kerja;** Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  
- **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;** Dengan Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
    - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
  - d. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
  - e. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
  
- **Program Penempatan Tenaga Kerja;** Dengan Kegiatan Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
    - Pelayanan antar Kerja

- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
  - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  - Job Fair/Bursa Kerja
- d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
- **Program Hubungan Industrial**; Dengan Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
    - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
    - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
  - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan

Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilias;
  - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota;
  - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;** Dengan Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan

sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Tabel T-C 33**  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kota Dumai

Dinas Tenaga Kerja

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasi onal	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS TENAGA KERJA					13.180.759.280					22.076.500.000				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.180.759.280					22.076.500.000				
	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					13.180.759.280					22.076.500.000				
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-		%	6.261.559.280					-	8.691.500.000		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	25 Doku men		12 Dokum en	65.000.000			-	Ketenagakerja an 01. PEMBANGUNA N EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	-	5 Doku men	80.000.000	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			3 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	3 Dokumen	28.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	3 Laporan	17.160.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	3 Laporan	8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5Dokumen		2 Dokumen	3.399.590.180,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Dokumen	4.105.000.000,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan			30 Orang/bulan	3.389.590.180,00	Kota Dumai, Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	30 Orang/bulan	4.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Laporan	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan			0 Laporan	0	Kota Dumai, Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5Laporan			2 Laporan	10.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	2 Laporan	45.000.000,00	
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		5 Laporan			2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	2 Laporan	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1200 rang			0 Dokumen	0,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	60 Orang	165.000.000,00	
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	33 Orang	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	60Bulan		13 Dokumen	495.050.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	12 Bulan	1.068.000.000,00	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	12 Paket	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	85.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	12 Paket	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket			12 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	12 Paket	85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket			12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	12 Paket	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen			12 Dokumen	5.050.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	12 Dokumen	8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Laporan	550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	25Paket			16 Unit	935.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	4 Paket	1.560.000.000,00	
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit			0 Unit Mobil	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Unit	130.000.000,00	DINASTENAGAKERJA
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8 Unit			1 Unit Mobil Pick Up	450.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	0 Unit	500.000.000,00	DINASTENAGAKERJA
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit			10 Unit	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	10 Unit	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	121 Unit			5 Unit	415.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	50 Unit	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Unit	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	60Bulan			3 Laporan	1.013.619.100,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	12 Bulan	1.145.000.000,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINASTENAGAKERJA
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5 Laporan			1 Laporan	122.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Laporan	255.000.000,00	DINASTENAGAKERJA
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Laporan	85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	886.619.100,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	18Paket		74 Unit	343.300.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	4 Paket	523.500.000,00	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			8 Unit	208.300.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	15 Unit	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit			65 Unit	40.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	65 Unit	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit			1 Unit	95.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Unit	198.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-			100	150.000.000,00						-		250.000.000,00	

	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	75% 0%		75	150.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	75% 75%	250.000.000,00	
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro													
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		100 Orang		40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	40 Orang	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-		10	1.925.000.000,00						-	4.320.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	00 Orang 6440 rang		644 Orang	1.800.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	960 Orang 250 Orang	3.670.000.000,00	



	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	0% 100%			30 LPK	0,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	100% 100%	150.000.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		101 Lem baga			0 Lem baga	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	20 Lem baga	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	100% 0%			0 Perizin an	0,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	100% 100%	150.000.000,00	
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														

						Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	50 Perizinan			0 Perizinan	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	20 Perizinan	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	0% 100 %		50 Perusahaan	50.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	100% 100%	150.000.000,00	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	80 Perusahaan			50 Perusahaan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	20 Perusahaan	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	25% 0%		0,25	75.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG	-	25% 25%	200.000.000,00	



						Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	55 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	20 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja													
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	220 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	100 Orang	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja													
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1100 Orang			300 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	300 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													

						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatka n Fasilitas Layanan ULD	130 Oran g			20 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Ketenagakerja an 01. PEMBANGUNA N EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	-	50 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja													
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayaka n Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1133 Oran g			100 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Ketenagakerja an 01. PEMBANGUNA N EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	-	480 Orang	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	-	0% 100 %		100	0,00			-	Ketenagakerja an 01. PEMBANGUNA N EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	-	100% 100%	200.000.000,00	
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS													

						Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	41 Lembaga			0 Lembaga	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	41 Lembaga	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	85% 0%		85	315.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	85% 85%	600.000.000,00	
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online													
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9 Dokumen			2 Dokumen	65.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													

						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6200 Oran g			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Ketenagakerja an 01. PEMBANGUNA N EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	-	3000 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja														
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatka n Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Oran g			50 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Ketenagakerja an 01. PEMBANGUNA N EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	-	50 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/K ota	-	85% 0%		85	70.000.000,00			-	Ketenagakerja an 01. PEMBANGUNA N EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	-	85% 85%	600.000.000,00		
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	195 Orang			30 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	70 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
						Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PAJAK DAERAH	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	50 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	160 Orang			70 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	70 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-			95	4.009.200.000,00						-		6.065.000.000,00	

	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0% 85%			85	430.000.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	85% 85%	1.000.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	165 Perusahaan			20 Perusahaan	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	50 Perusahaan	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	80 Perusahaan			10 Perusahaan	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	25 Perusahaan	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	

	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan			5 Laporan	400.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	5 Laporan	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 0%		100	3.579.200.000,00			-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	100% 100%	5.065.000.000,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	180 Perkara			20 Perkara	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	55 Perkara	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	190 Perkara			50 Perkara	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	50 Perkara	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja			29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga			1 Lembaga	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Lembaga	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													

						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16000 Orang			16.000 Orang	3.250.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	16000 Orang	4.000.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>J U M L A H</b>											<b>13.180.759.280</b>					<b>22.076.500.000</b>			

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **V.I Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja** jumlah Anggaran sebesar Rp30.000.000,00; Dengan Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) jumlah Anggaran sebesar Rp30.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro jumlah Anggaran sebesar Rp30.000.000,00
  
- 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** jumlah Anggaran sebesar Rp550.000.000,00; Dengan Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi jumlah Anggaran sebesar Rp500.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi jumlah Anggaran sebesar Rp400.000.000,00
    - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp100.000.000,00
  - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta jumlah Anggaran sebesar Rp0,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta jumlah Anggaran sebesar Rp0,00
  - c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp0,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi jumlah Anggaran sebesar Rp0,00
  - d. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil jumlah Anggaran sebesar Rp50.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil jumlah Anggaran sebesar Rp50.000.000,00
- e. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp0,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp0,00

**3. Program Penempatan Tenaga Kerja** jumlah Anggaran sebesar Rp525.000.000,00; Dengan Kegiatan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp320.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp0,00
  - Pelayanan antar Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp0,00
  - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp50.000.000,00
  - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan jumlah Anggaran sebesar Rp20.000.000,00
  - Perluasan Kesempatan Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp250.000.000,00
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp0,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS jumlah Anggaran sebesar Rp0,00
- c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp135.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online jumlah Anggaran sebesar Rp65.000.000,00
  - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online jumlah Anggaran sebesar Rp0,00
  - Job Fair/Bursa Kerja jumlah Anggaran sebesar Rp70.000.000,00
- d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp70.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) jumlah Anggaran sebesar Rp50.000.000,00
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran jumlah Anggaran sebesar Rp0,00
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan jumlah Anggaran sebesar Rp20.000.000,00

**4. Program Hubungan Industrial** jumlah Anggaran sebesar Rp774.200.000,00; Dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp430.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan jumlah Anggaran sebesar Rp15.000.000,00
  - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan jumlah Anggaran sebesar Rp15.000.000,00
  - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan jumlah Anggaran sebesar Rp400.000.000,00
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp 344.200.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp20.000.000,00
  - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp50.000.000,00

- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilias jumlah Anggaran sebesar Rp9.200.000,00
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota jumlah Anggaran sebesar Rp250.000.000,00
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja jumlah Anggaran sebesar Rp15.000.000,00

**5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** jumlah Anggaran sebesar Rp 5.081.559.280,00; Dengan Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp65.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 20.000.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 15.000.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp10.000.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 3.399.590.180,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah Anggaran sebesar Rp3.389.590.180,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 295.050.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jumlah Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah Anggaran sebesar Rp 85.000.000,00
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah Anggaran sebesar Rp 30.000.000,00
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan jumlah Anggaran sebesar Rp 15.000.000,00
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah Anggaran sebesar Rp 5.050.000,00
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 150.000.000,00
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 135.000.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00
  - Pengadaan Mebel jumlah Anggaran sebesar Rp 70.000.000,00
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah Anggaran sebesar

Rp65.000.000,00

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 833.619.100,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah Anggaran sebesar Rp5.000.000,00
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah Anggaran sebesar Rp 122.000.000,00
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah Anggaran sebesar Rp 0,00
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah Anggaran sebesar Rp 706.619.100,00
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah Anggaran sebesar Rp 343.300.000,00, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah Anggaran sebesar Rp 208.300.000,00
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah Anggaran sebesar Rp40.000.000,00
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah Anggaran sebesar Rp 95.000.000,00

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan sebagai awal dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai 2022-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Walikota Dumai, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.

Rencana Kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang ber sumber dari anggaran APBD Kota Dumai Tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025, maka penerapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Dumai.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025.

Oleh karena permasalahan dalam pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terus berkembang, maka diperlukan prioritas dan arah pembangunan dari urusan ketenagakerjaan di Kota Dumai, maka pada tahun 2025 lebih difokuskan pada :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dumai, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770524 199602 1 002